



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs.H.BUDIMAN,M.Pd.

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR



Drs.H.BUDIMAN, M.Pd.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



HALSEN, S.IP, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal	3,23 %
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	70,35%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.360.993.680,00	APBD
2.	Program Penataan Desa	Rp 40.929.286,00	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 820.390.967,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 749.546.483,00	


 BUPATI LUWU TIMUR

 (Drs. H. BUDIMAN, M. Pd.)

Matili, 7 Januari 2022
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

 (HALSEN, S.IP, MM)



PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN, ST

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PMD

HALSEN, S.IP, MM

ERWIN, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BIDANG : SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

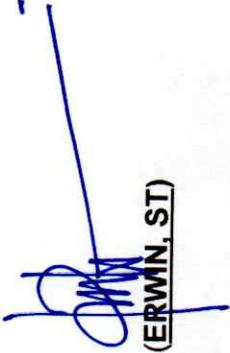
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%
1.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terwujudnya Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5.	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100%
6.	Tersedianya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%
7.	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.360.993.680,00	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 64.237.710,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.567.997.177,00	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 21.404.580,00	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 64.337.063,00	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 417.604.050,00	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 216.735.600,00	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 117.413.100,00	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 105.600.000,00	APBD

KEPALA DINAS PMD

Malili, 7 Januari 2022
SEKRETARIS DINAS PMD,


(HALSEN, S.IP.MM)


(ERWIN, ST)



PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. SITTI NURHAENI, BA

Jabatan : KEPALA BIDANG PEGEMBANGAN SDM DAN SDA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMD,

HALSEN, S.IP, MM

Pihak Pertama,
KABID. PENGEMBANGAN SDM
DAN SDA

HJ. SITTI NURHAENI, BA

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III TAHUN 2022

BIDANG : PENGEMBANGAN SDM DAN SDA
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa	Persentasi desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	70 %
1	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentasi desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	100 %
1.	Meningkatnya kapasitas aparatur desa	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan	61 orang
1.	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga masyarakat, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga masyarakat, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	60 %
1.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pemberdayaan Lembaga masyarakat, Lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	100 %

1.	Meningkatnya pendapatan asli desa	Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMDesa	4 kali	
		Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2MP	4 kali	
		Jumlah pengurus P2MP yang mengikuti peningkatan kapasitas	124 orang	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 275.297.641,00	APBD
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 275.297.641,00	APBD
1.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp 275.297.641,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 83.382.063,00	APBD
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 83.382.063,00	APBD
1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp 83.382.063,00	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMD,


HALSEN, S.IP., MM

Malili, 7 Januari 2022
Pihak Pertama,
KABID. PENGEMBANGAN SDM DAN SDA


HJ. SITTI NURHAENI, BA



PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I WAYAN SUDINO, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG PENATAAN DESA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMD,

Pihak Pertama,
KABID. PENATAAN DESA

HALSEN, S.IP, MM

I WAYAN SUDINO, SE

		Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	124 desa
3.	Terlaksananya perencanaan pembangunan desa	Jumlah fasilitasi penyusunan RKP Desa	100 desa
		Jumlah fasilitasi penyusunan RPJMDes	61 desa
4.	Terlaksananya penyusunan APBDesa	Jumlah fasilitasi penyusunan APBDesa	124 desa
5.	Terlaksananya evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah desa yang menyampaikan LKPJ dan LKPPD desa tepat waktu	124 desa
6.	Terlaksananya seleksi perangkat desa	Jumlah fasilitasi seleksi perangkat desa	15 desa
7.	Terlaksananya desa yang menyusun profil desa	Jumlah desa yang menyusun profil desa	124 desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Desa	Rp 40.929.286,00	APBD
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp 40.929.286,00	APBD
1.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Rp 40.929.286,00	APBD

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III TAHUN 2022

BIDANG : PENATAAN DESA
TAHUN ANGGARAN : 2022

(1)	No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	(2)	(3)	Target
1.		Meningkatnya penataan desa	Persentase peningkatan penataan desa	100 %	(4)
1.		Terlaksananya penataan desa	Persentase terlaksananya penetapan desa persiapan	100 %	
1.		Terlaksananya penetapan desa persiapan	Persentase Fasilitasi usulan pemekaran desa	100%	
2.		Meningkatnya Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa	100%	
1		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	100%	
1.		Terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan pemerintah desa yang dilakukan	4 kali	
2.		Terlaksananya Produk hukum daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah desa	2 kali	
			Jumlah Produk Hukum daerah yang disusun dan disosialisasikan	5 perbup	

2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 411.378.800,00	APBD
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 411.378.800,00	APBD
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 33.753.030,00	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp 116.612.830,00	APBD
3.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 91.778.208,00	APBD
4.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 63.593.658,00	APBD
5.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Rp 47.195.094,00	APBD
6.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 47.558.308,00	APBD
7.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp 10.887.672,00	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMD,

HALSEN, S.IP.,MM

Malili, 7 Januari 2022
Pihak Pertama,
KABID PENATAAN DESA

IWAYAN SUDINO, SE



PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASONDENG ABBAS, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMD,

HALSEN, S.IP,MM

Pihak Pertama,
KABID. KELEMBAGAAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BASONDENG ABBAS, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III TAHUN 2022

BIDANG : KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Program/Kegiatan/SubKegiatan (2)	Indikator Program/Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi	70 %
1.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi	Persentasi desa yang tertib administrasi	100%
1.	Terlaksananya Pembinaan Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang diberi peningkatan	124 desa
		Jumlah Rapat Koordinasi	1 kali
2.	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga masyarakat, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga masyarakat, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	60%
1.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pemberdayaan Lembaga masyarakat, Lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	100%

	1.	Meningkatnya pelayanan posyandu	Jumlah kader posyandu yang di bina	274 kader
			Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi TP-PKK Kabupaten	12 kali
	2.	Terlaksananya Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah pembinaan TP-PKK Kabupaten	12 kali
			Jumlah TP-PKK yang dimonitoring dan di evaluasi	139 klp

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 133.714.526,00	APBD
1.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 133.714.526,00	APBD
1.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp 133.714.526,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 666.164.420,00	APBD
1.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 666.164.420,00	APBD
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 106.356.250,00	APBD

2.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp	559.808.170,00	APBD
----	---	----	----------------	------

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMD,



HALSEN, S.IP., MM

Mallii, 7 Januari 2022

Pihak Pertama,
KABID. KELEMBAGAAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



BASONDENG ABBAS, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANI ISMAIL, SH

Jabatan : KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN (RANPEG)

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERWIN, ST

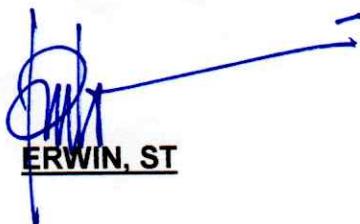
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua.
SEKRETARIS DINAS PMD


ERWIN, ST

Malili, 7 Januari 2022

Pihak Pertama.
KASUBAG. RANPEG


FITRIANI ISMAIL, SH

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ESELON IV TAHUN 2022**

SUBAG : RANPEG
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3 dokumen
2	Tersedianya dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen
3	Tersedianya dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen
4	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen
5	Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 dokumen
6	Tersedianya aparatur yang telah ditingkatkan kapasitasnya melalui sosialisasi perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 orang
7	Tersedianya aparatur yang telah ditingkatkan kapasitasnya melalui bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	5 orang

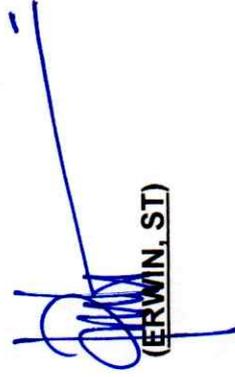
No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 39.201.550,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.522.760,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.654.210,00	APBD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 17.859.190,00	APBD
5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 4.047.063,00	APBD
6.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 22.490.000,00	APBD
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 37.800.000,00	APBD

Malili, 7 Januari 2022
KASUBAG. RANPEG



(FITRIANI ISMAIL, SH)

SEKRETARIS DINAS



(ERWIN, ST)



PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMISISWANTI, S,Si

Jabatan : KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERWIN, ST

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua

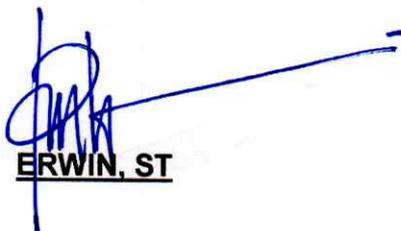
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 7 Januari 2022

Pihak Kedua.
SEKRETARIS DINAS PMD

Pihak Pertama.
KASUBAG. UMUM & KEUANGAN


ERWIN, ST


EMISISWANTI, S.Si

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ESELON IV TAHUN 2022**

SUBAG : UMUM & KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2022

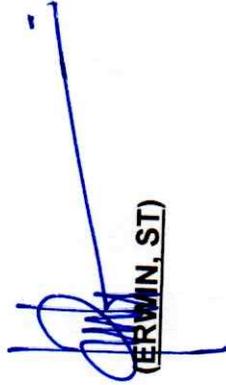
No. (1)	Sasaran Sub Kegiatan (2)	Indikator Sub Kegiatan (3)	Target (4)
1	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	22 orang
2	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 dokumen
3	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 dokumen
4	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 buah
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	16 jenis
7	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	2 jenis
8	Tersedianya bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 eksemplar
9	Terfasilitasnya kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	13 orang
10	Terlaksananya rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	104 kali
11	Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang diadakan	9 unit

No. (1)	Sasaran Sub Kegiatan (2)	Indikator Sub Kegiatan (3)	Target (4)
12	Tersedianya peralatan/mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 unit
13	Tersedianya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit
14	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1717 surat
15	Tersedianya jasa komunikasi. listrik, SDA dan air	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening
16	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 orang
17	Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit
18	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 unit
19	Tersedianya gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 gedung
20	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	2 gedung

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.503.147.577,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 64.849.600,00	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 21.404.580,00	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.540.050,00	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.115.500,00	APBD
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 10.499.500,00	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 7.015.600,00	APBD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.920.000,00	APBD
9.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 26.235.000,00	APBD
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 358.278.400,00	APBD
11.	Pengadaan Mebel	Rp 11.500.000,00	APBD
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 46.235.600,00	APBD
13.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 161.400.000,00	APBD
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.859.100,00	APBD
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 49.554.000,00	APBD

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 63.000.000,00	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 52.800.000,00	APBD
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 17.800.000,00	APBD
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 20.000.000,00	APBD
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 15.000.000,00	APBD

SEKRETARIS DINAS PMD


(ERWIN, ST)

Malili, 7 Januari 2022
KASUBAG. UMUM & KEUANGAN


(EMISWANTI, S.Si)